

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Menteri Pertanian Indonesia pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan No. 48 tentang UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting) bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan khususnya berasal dari hewan. Kemudian ditetapkanlah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk tahun 2018 sampai 2023 di wilayah Kabupaten Purwakarta mengenai pangan dan pertanian yaitu (1) Meningkatkan kesediaan akses dan keanekaragaman pangan masyarakat, (2) Meningkatkan populasi perikanan, (3) Meningkatkan populasi dan produksi peternakan (Pemerintah Kabupaten Purwakarta, 2018).

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu kabupaten yang mengurus pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ialah pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, pemerintah Kabupaten Purwakarta bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan wajib urusan pangan. Juga melaksanakan dua urusan pilihan yaitu perikanan dan pertanian khususnya subsektor peternakan.

Hal itu menjadi keunikan kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan kebijakan pengembangan sentra pembibitan dan produksi ternak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, serta meningkatkan sarana prasarana produksi peternakan melalui Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendukung upaya Pemerintah Pusat meningkatkan kegiatan Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mencakup kegiatan pengembangan teknologi Inseminasi Buatan pada ruminansia. Inseminasi Buatan (IB) ialah teknik memasukkan mani ke dalam tempat reproduksi ternak betina sehat agar dapat membuahi sel telur dengan memakai alat khusus. Selama pelaksanaan program ini, masyarakat sangat terbantu dalam meningkatkan produksi ternak mereka. Namun permasalahannya tenaga ahli yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan sangat terbatas.

Program ini merupakan unsur pendukung pembangunan di Indonesia. Pembiayaan PPPTP menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta serta DAK (Dana Alokasi Khusus). Dimana kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha mengungkapkan realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD rata-rata di bawah 90%. Norman memaparkan, besaran APBD 2019 mencapai Rp2.400.000.000.000,00

sedangkan capaian yang sudah terserap, pada angka Rp2.200.000.000.000,00. Walaupun tidak terserap seluruhnya, menurutnya hasil tersebut cukup baik (Istiqomah, 2020).

SKPD yang melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kinerja anggaran bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya yang berkaitan dengan peternakan yang ada di daerah Purwakarta adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta. Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta perlu dievaluasi dalam berbagai program yang dilaksanakan. Sebab program-program itu berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja. Begitupun program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tahun 2017-2019 di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, diperlukan evaluasi karena anggaran belanja yang telah disusun anggaran yang diserap tidak mencapai 100% artinya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Maka terdapat permasalahan yang terjadi pada program tersebut.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan khususnya pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (PPPTP) Tahun 2017-2019 :

**Tabel 1.1**

**Anggaran dan Realisasi Belanja PPPTP Tahun 2017**

<b>Nama Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian Anggaran (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Program Peningkatan		<b>200,000,000</b>	<b>108,191,000</b>	<b>54,10</b>

Penerapan Teknologi Peternakan	Pengembangan Teknologi IB (Inseminasi Buatan) pada Sapi Potong	150.000.000	108.191.000	72,13
	Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan	50,000,000	0	0

Sumber : LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

**Tabel 1.2**

**Anggaran dan Realisasi Belanja PPPTP Tahun 2018**

Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		<b>125.000.000</b>	<b>62.378.000</b>	<b>49,90</b>
	Pengembangan Teknologi IB (Inseminasi Buatan) pada Sapi Potong	75.000.000	62.378.000	83,65
	Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan	50,000,000	0	0

Sumber : LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

**Tabel 1.3**

**Anggaran dan Realisasi Belanja PPPTP Tahun 2019**

Nama Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi bidang Peternakan		<b>270.000.000</b>	<b>191.914.000</b>	<b>71,04</b>
	Pengembangan Teknologi IB (Inseminasi Buatan) pada Sapi Potong	150.000.000	145.500.000	97,00

Penyelamatan serta Penjaringan Anak Hasil Inseminasi Buatan	50.000.000	46.314.000	92,63
Pengadaan Alat dan Mesin bidang Peternakan	70.000.000	0	0

Sumber : LAKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3 di atas, realisasi anggaran belanja PPPTP pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta belum mencapai target anggaran. Penyerapan anggaran pada tahun 2017-2019 berturut-turut sebesar 54,10%, 49,90%, 71,04%. Realita tersebut terjadi akibat adanya satu kegiatan yang selalu tidak terlaksana selama tiga tahun yaitu pengadaan alat dan mesin peternakan. Selain itu menurut Ibu Intan Riani selaku kepala seksi pembibitan bidang peternakan menyatakan bahwa kesulitan dalam peningkatan PPPTP ini ialah pada sumber daya petugas (inseminator) yang memadai, sehingga pelaksanaan IB mengalami penurunan dari jumlah akseptor dan angka kelahiran.

Bersumber pada permasalahan tersebut maka perlu dilakukan sebuah evaluasi untuk mengukur kinerja dari Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Proses evaluasi merupakan kegiatan membandingkan kinerja dengan hasil yang diharapkan kemudian akan memberikan timbal balik sebagai alat evaluasi hasil yang telah dilaksanakan demi perkembangan program. Untuk menganalisis serta mengevaluasi kinerja dari Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dapat dikatakan baik atau buruk

dapat diukur dengan pengukuran kinerja anggaran belanja. Berikut hasil pengukuran awal pada PPPTP :

**Tabel 1.4**  
**Varians Belanja PPPTP Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Varians Belanja (RP)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2-3)=(4)</b>
2017	200.000.000	108.191.000	91.809.000
2018	125.000.000	62.378.000	62.622.000
2019	270.000.000	191.814.000	78.186.000

Sumber : Data diolah, 2021

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi varians belanja dari tahun 2017-2019. Realisasi anggaran yang paling tinggi pada tahun 2017, yakni Rp.91.809.000,00. Realisasi anggaran yang paling rendah pada tahun 2019 yakni sebesar Rp.62.622.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat varians belanja yang tinggi setiap tahunnya. Sistem penganggaran dengan memfokuskan pendayagunaan dana yang ada untuk mencapai hasil optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan disebut sistem penganggaran berbasis kinerja. Maka setiap penyerapan anggaran harus menghasilkan output bagi masyarakat.

**Tabel 1.5**  
**Efisiensi Belanja PPPTP Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
2017	200.000.000	108.191.000	54,10
2018	125.000.000	62.000.000	49,90
2019	270.000.000	191.814.000	70,74

Sumber : Data diolah, 2021

Data tersebut menggambarkan tingkat efisiensi yang dicapai atas PPPTP di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta belum maksimal. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi tercapai sebesar 54,10%. Tahun 2018 menurun menjadi 49,90%. Kemudian pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 70,74%. Proses operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana dan sumber daya yang rendah.

**Tabel 1.6**  
**Pertumbuhan Belanja PPPTP Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Tahun t (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun t-1 (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3-2)=(4)</b>	<b>(5)</b>
2017	108.191.000	-	-	-
2018	62.000.000	108.191.000	-46.191.000	-42,70%
2019	191.814.000	62.000.000	129.814.000	209,3 %

Sumber : Data diolah, 2021

Data di atas menunjukkan pertumbuhan belanja PPPTP belum stabil. Pada tahun 2018 tidak terjadi pertumbuhan belanja, melainkan penurunan sebesar -42,70%. Kemudian tahun 2019 meningkat tajam yakni sebesar 209,3%. Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahun pasti mengalami hambatan dan kesulitan berbeda. Oleh karena itu faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan belanja harus diminimalisir sehingga pertumbuhannya bisa tetap stabil.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tentu perlu dibuktikan secara empiris melalui penelitian, lalu dikaji serta di analisis menggunakan teori yang sesuai.

Sehingga penulis memberi judul penelitian ini yaitu “**EVALUASI KINERJA ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN (PPPTP) PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017-2019**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas permasalahan yang ditemukan penulis sebagai berikut :

1. Tingkat varians antara realisasi belanja dengan anggaran belanja PPPTP di Dinas Perikanan dan Peternakan masih tinggi sebab adanya program yang tidak terealisasikan.
2. Upaya efisiensi yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta belum maksimal.
3. Pertumbuhan belanja PPPTP di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2017 - 2019 belum stabil.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini menyesuaikan dengan latar belakang yaitu bagaimana evaluasi kinerja anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (PPPTP) pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2019?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan adanya penelitian ini yakni untuk mengetahui evaluasi kinerja anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (PPPTP) pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2019

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat diantaranya :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
- 2) Mengetahui evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kinerja anggaran PPPTP
- 3) Menambah pengetahuan mengenai PPPTP dan menjadi wawasan pembaca mengenai evaluasi kinerja anggaran PPPTP di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

##### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan menulis, mengembangkan wawasan dalam penerapan hasil studi mengenai anggaran belanja dinas di kabupaten Purwakarta

- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pemikiran khususnya tentang penganggaran PPPTP terhadap Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.

## F. Kerangka Pemikiran

Arifin (2019:8) mengartikan evaluasi program sebagai kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan atas usaha penetapan mutu program, pengendalian, dan penjaminan berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria untuk menentukan keputusan serta pertanggungjawaban pelaksanaan program.

Arifin (2019:26) menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi program meliputi tujuh langkah pokok yaitu :

1. Perencanaan evaluasi program : menentukan indikator capaian, kemudian menentukan teknik pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, serta penggunaan waktu dengan sebaik-baiknya.
2. Pelaksanaan evaluasi program : pengumpulan data dan informasi dalam seluruh aspek program.
3. Monitoring pelaksanaan evaluasi : mengetahui hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi, untuk mengetahui kejadian apa saja selama pelaksanaan evaluasi.
4. Analisis data dan penafsiran : melakukan olah data sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan menafsirkan data.

5. Penyusunan rekomendasi : rekomendasi dilakukan secara sistematis berdasar pada hasil proses analisis data di setiap bagian program, kemudian merekomendasikan program secara keseluruhan.
6. Penyusunan laporan : dapat memberikan umpan balik kepada semua pihak secara langsung atau tidak langsung.
7. Pemanfaatan hasil evaluasi : bermanfaat untuk membantu penentu keputusan dalam menentukan suatu kebijakan baru.

Penganggaran menurut Suwanda dkk (2018:29) adalah proses mempersiapkan anggaran yang di dalamnya terdapat pernyataan berupa catatan keuangan, berupa refleksi kegiatan dan target kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan program kerja pada daerah tertentu berbentuk angka dengan menyusun, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah berhubungan dengan APBD (Dadang Suwanda dkk, 2019:14).

Untuk memberikan penilaian, bagaimana kinerja pemerintah diperlukan alat analisis, yakni analisis kinerja anggaran belanja yang berfungsi mengukur capaian kinerja anggaran PPPTP. Penulis menggunakan analisis kinerja anggaran (Mahmudi, 2010) yaitu:

1. Analisis varians belanja

Ialah pengukuran analisis perbedaan (selisih) anggaran belanja dengan realisasi belanja. Kinerja anggaran dikatakan baik jika selisihnya kecil

atau dikatakan kurang baik jika selisihnya banyak. Rumus analisis varians belanja, seperti di bawah ini :

$$\text{Analisis varian belanja} = \text{realisasi anggaran} - \text{anggaran belanja}$$

(Mahmudi, 2010:157)

## 2. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Ialah analisis menghitung tingkat efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah. Berikut rumus mengukur rasio efisiensi anggaran belanja :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100$$

(Mahmudi, 2010:166)

Semakin rendah nilai selisih maka semakin efisien kinerja pemerintah dalam penganggaran belanja daerah. Umumnya, nilai efisiensi dapat dikategorikan seperti dibawah ini:

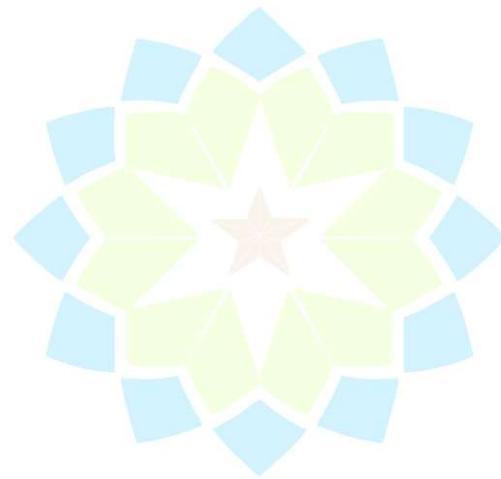
- a. Tidak efisien : > 100%
- b. Kurang efisien : 91% - 100%
- c. Cukup efisien : 81% - 90%
- d. Efisien : 60% - 80%
- e. Sangat efisien : < 60%

## 3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Merupakan analisa yang digunakan untuk melihat kenaikan belanja beberapa tahun terakhir sehingga bisa diketahui berapa tingkat pertumbuhan setiap realisasi belanja. Rumusnya seperti di bawah ini :

$$Pertumbuhan\ belanja\ Thn\ t = \frac{realisasi\ belanja\ thn\ t - realisasi\ belanja\ thn\ t-1}{realisasi\ belanja\ thn\ t-1} \times 100$$

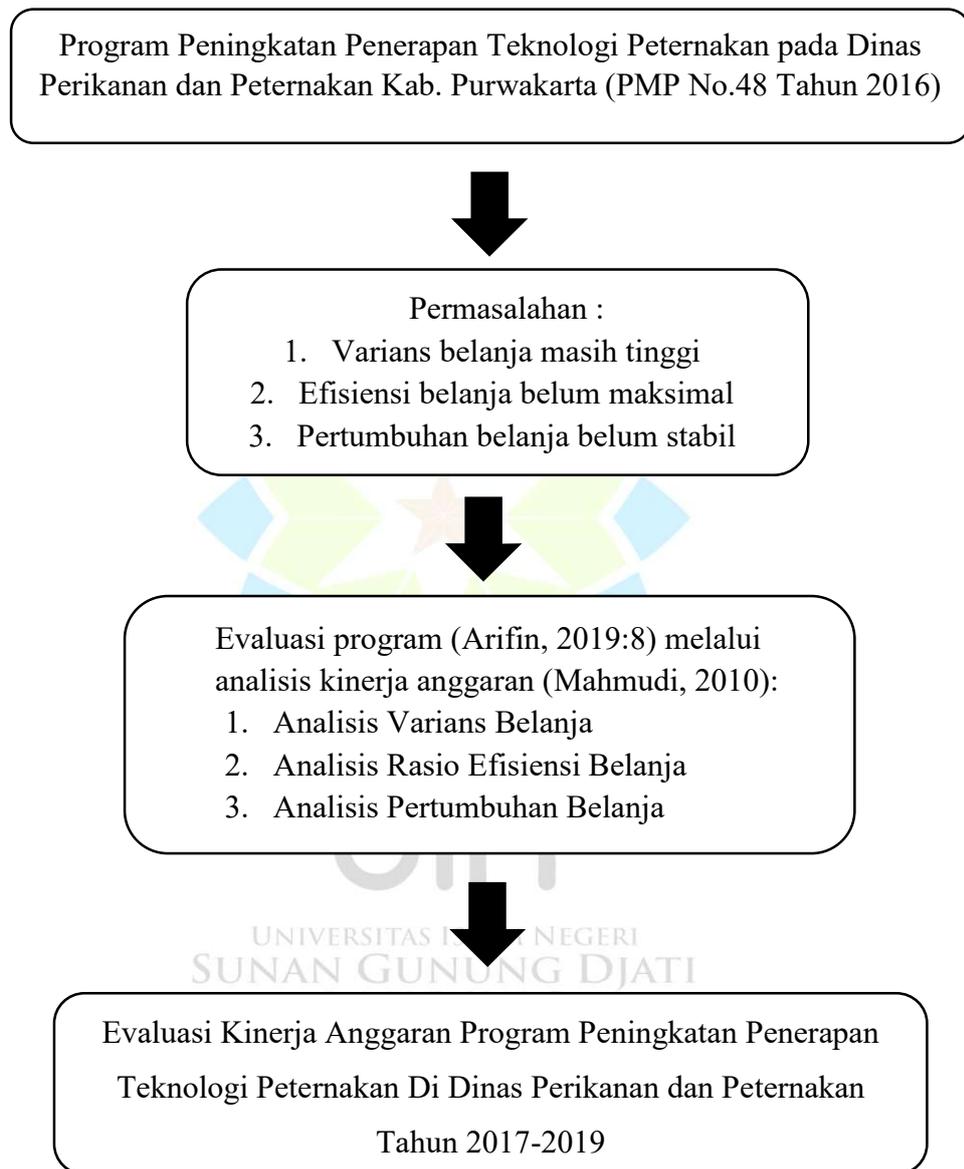
(Mahmudi, 2010:160)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Dibawah ini merupakan gambaran kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**